

**TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI : EFEKTIFITAS
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister
Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana**

Oleh:

ERLINA SARI

R100186005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI : EFEKTIFITAS PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI FLORES
TIMUR)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ERLINA SARI

R100186005

Tealh diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Kelik Wardiono, SH., M.H

NIDN. 0026126801

Dosen Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.H

NIDN. 0625045901

HALAMAN PENGESAHAN

TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI : EFEKTIFITAS PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR

TESIS

Oleh

ERLINA SARI
NIM : R 100 186 005

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
NIDN : 00261226801

Penguji

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIDN : 0625045901

Anggota

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum
NIDN : 0605056301

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dan telah memenuhi syarat kelulusan
Pada tanggal 23 Maret 2021



Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Bambang Sumardjoko
NIDN : 0014056201

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Maret 2021

Penulis



ERLINA SARI
R100186005

TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI : EFEKTIFITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengplanasikan karakteristik penanganan tindak pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Flores Timur? Dan efektifitas penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores timur, penelitian yang dilakukan penulis ini mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *Pertama*, Karakteristik Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Flores Timur yaitu Kejaksaan Negeri Flores Timur melakukan penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Pos Pelayanan Hukum di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Flores Timur, kemudian kejaksaan Negeri Flores Tmur melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. *Kedua*, Terkait efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur didukung oleh faktor masyarakat dan kebudayaan, namun tidak didukung dengan faktor hukum dan penegak hukum dan sarana dan fasilitas pendukung

Kata Kunci: Efektifitas, Korupsi, Kejaksaan

Abstract

This study aims to describe and implement the characteristics of the handling of corruption in the East Flores District Public Prosecutor's Office? And the effectiveness of handling corruption in the East Flores District Attorney's Office, the research conducted by this author is based on a qualitative non-doctrinal approach. Therefore in this research, it is more focused on primary data collected by interviews and observations, and supported by secondary data collected by library research. Data that has been processed for further qualitative analysis. Based on the results of the study it was found that First, the Characteristics of Corruption Crime Handling in the East Flores District Prosecutor's Office namely the East Flores District Prosecutor's Office handling criminal acts of corruption based on reports from the public received by the Legal Service Post in the East Flores District Prosecutor's Office, then the Flores Tmur District Prosecutor's Office. carry out investigations, investigations and prosecutions. Second, Regarding the effectiveness of the handling of corruption in the East Flores District Attorney mentioned above, it can be concluded that the implementation of the handling of corruption in the East Flores District Attorney is supported by community and cultural factors, but not supported by legal factors and law enforcement and facilities and supporting facilities

Keywords: effectiveness, corruption, prosecutors' office

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang selalu menjadi perhatian masa, karena tindak pidana korupsi menimbulkan banyak dampak yaitu bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu, terhadap generasi muda, terhadap politik, terhadap Ekonomi bangsa, dan yang terakhir memiliki bahaya untuk birokrasi yang ada di Indonesia (Aziz, 2005). Dan yang merupakan urgensi adalah korupsi dapat merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa, jika suatu proyek dijalankan dengan unsur-unsur korupsi maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat tercapai (Meier dan. Ruch, 2005).

Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, berbagai cara yang dilakukan contohnya seperti sanksi yang diperberat (Setiadi, 2018), Tindak pidana korupsi pada dasarnya digolongkan menjadi beberapa bentuk berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi tersebut maka tindak pidana korupsi masuk sebagai salah satu tindak pidana khusus dengan demikian penyelesaian tindak pidananya menggunakan pengadilan khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Pemberantasan Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian perlu pengaturan mengenai pengadilan Tindak Pidana Korupsi di dalam suatu undang-Undang sendiri.

Kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya berada di setiap ibu kota provinsi tersebut ternyata menimbulkan masalah dalam penerapannya di Indonesia. Karena Indoneisa merupakan negara kepulauan terbesar di dunia

(Malta, 2018), dengan demikian hal ini akan mempengaruhi proses penanganan tindak pidana yang berada di ibu kota provinsi yang di dalamnya termasuk sarana dan prasarana dan biaya penanganan perkara. Hal ini pada dasarnya Diatur di dalam asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Salah satu contoh dari kenyataan empiris tersebut yaitu terjadi di Kabupaten Flores Timur dimana di dalam Kejaksaan Flores timur jika menyelesaikan perkara tindak pidana dilakukan di ibu kota provinsi yaitu Kupang, sementara itu antara Kupang dan Flores timur berbeda pulau dengan demikian diperlukan transportasi udara untuk setiap melakukan persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena setiap perkara yang diselesaikan harus menjalani sidang setidaknya 5 kali, bahkan terkadang untuk korupsi dibawah 100jt antara tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan biaya melaksanakan perkara lebih besar biaya berperkara.

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian ini karena penanganan tindak pidana korupsi ini pada dasarnya mengalami suatu permasalahan yang dimana penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya yang menyebabkan beban anggaran pelaksanaan proses peradilan yang besar di instansi Kejaksaan.

2. METODE

Penelitian ini mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Flores Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh dari Wawancara dan observasi terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Flores Timur (2) Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial (Faisal, 2007).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Flores Timur

Berikut ini penulis uraikan mengenai penanganan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Tahun 2018

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Dalam kasus yang masuk tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Flores Timur dari kedua kasus yang ada semuanya pelaporan yang diterima atau pengaduan dari KBRF (Koalisi Bersatu Rakyat Flores Timur) dan telah dilaksanakan melakukan penyelidikan yang diperlukan membuat berita acara penyidikan, namun untuk kasus korupsi penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan berita acara yang diserahkan ke penyidik belum lengkap karena barang bukti yang terkumpul belum lengkap. Jadi dengan demikian terkait dengan penyelidikan di tahun 2018 mengenai tahap penyelidikan tindak pidana korupsi yang ada di Kejaksaan Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan norma yang ada yaitu Pasal 2 ayat 2.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus . Dalam dua kasus di tahun 2018 yang masuk kedalam tahap penyelidikan jika dilihat dari data di atas baik kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pada Puskesmas Kalike, Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Rutin (Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa) di SMP Negeri 1 Adonara Timur Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016), an. Terdakwa SUBRAJA ALANG, A.Md dimana pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Flores Timur yang terdiri dari terdiri dari 7 anggota tim. Dan dalam pelaksanaannya penunjukan penyidik ini sudah dibuatkan surat perintah penyelidikan. Jadi dengan demikian dari pelaksanaan

penyelidikan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum maka hal ini telah sesuai dengan norma yang ada, karena sesuai dengan Pasal 3 yaitu sudah sesuainya jumlah anggota tim penyelidikan dan dibuatkannya surat perintah penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Terkait dengan kasus yang masuk ke tahap penyelidikan pada tahun 2018 yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pada Puskesmas Kalike, Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur selama 2018 masih dalam proses untuk mencari bukti terhadap tindak pidana yang telah dilakukan dan belum bisa di masukan ke tahap penyelidikan meskipun dalam hal ini tim penyelidikan yaitu koordinator tim penyelidikan dan anggota penyelidikan sudah berusaha untuk menjalankan tugasnya namun dikarenakan adanya kendala-kendala yaitu prioritas kasus yang diselesaikan, dan jumlah personil dan juga sarana dan prasarana yang tidak memadai. Berbeda dengan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Rutin (Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa) di SMP Negeri 1 Adonara Timur Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016), an. Terdakwa SUBRAJA ALANG, A.Md yang hasilnya dapat dilanjutkan ke tahapan penyelidikan dikarenakan sudah cukup bukti mengenai tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh pelaku dengan demikian tim penyelidik sudah melaksanakan tugas, wewenang dan wewenangnya dengan baik. Dengan demikian penyelidikan ini belum sesuai dengan norma karena terdapat satu kasus yang belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus . Di dalam tahap penyelidikan di tahun 2018, untuk kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan pada Puskesmas Kalike, Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur terkait dengan norma yang ada pada kenyataannya pengumpulan bahan keterangan, data , bukti belum dapat terpenuhi dalam waktu 20 hari, dikarenakan terdapat beberapa

kendala yaitu jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada, selain itu juga sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya keadaan geografis Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari 3 pulau hal ini menyebabkan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan, sarana dan prasarana tidak memadai, dengan keadaan geografis yang merupakan kepulauan tersebut seringkali orang-orang yang dipanggil sudah tidak berada ditempat atau sudah lansia jadi untuk dilakukan pemeriksaan membutuhkan waktu yang lama, atau diperlukan koordinasi dengan kejaksaan daerah lain apabila orang yang dipanggil sudah melarikan diri atau tidak berada di tempat.

Sementara itu kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Rutin (Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa) di SMP Negeri 1 Adonara Timur Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016), an. Terdakwa SUBRAJA ALANG, A.Md terkait dengan Pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana rutin dapat terpenuhi selama 20 hari dengan baik dan dapat dilaksanakan, dikarenakan untuk melakukan lebih mudah di bandingkan dengan kasus yang sebelumnya. Dengan demikian belum sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Di dalam kasus yang masuk pada tahap penyidikan tahun 2019 yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Rutin (Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa) di SMP Negeri 1 Adonara Timur Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016), an. Terdakwa SUBRAJA ALANG, A.Md. / Sudah inkraeth dalam praktiknya kasus tersebut bersumber dari sumber penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang oleh pimpinan diputuskan untuk di tingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi dengan demikian terkait dengan sumber penyidikan telah sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus . Terkait dengan tim penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Flores Timur, dilaksanakan oleh 7 orang anggota yang terdiri dari 1 orang anggota

coordinator dan 6 orang anggota. Jadi dengan demikian sesuai dengan Pasal 9 sudah sesuai dengan norma yang ada, namun yang khusus merupakan anggota bidang tindak pidana khusus hanya 2 orang, selebihnya adalah jaksa dibidang lain yang memiliki kesibukan masing-masing dibidangnya, sehingga proses penyidikan dalam upaya mencari dan menemukan barang bukti belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Adminsitasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum Telah menerima laporan, dan tidak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sudah melakukan pemeriksaan dan penyitaan, surat karena, hal ini disebabkan adanya kendala prioritas penyelesaian kasus yang ada di kejaksan Flores Timur maka untuk pelaksanaan penindakan ini belum dapat dilaksanakan oleh kejaksan negeri Flores Timur. Dengan demikian terkait belum berjalan sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Adminsitasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terkait dengan kasus yang telah dilakukan upaya mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkannya, dalam kasus yang dalam tahap penyidikan ini namun dalam pelaksanaanya bukti yang diperoleh belum cukup maka masih dilanjutkan dalam tahap penyidikan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yaitu kelengkapan berkas dan prioritas penyelesaian kasus yang harus diselesaikan. Dikarenakan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi akan mengurus anggaran kejaksan sendiri karena sarana dan prasarana yang tidak memadai dan berbagai permasalahan lain yang menyebabkan proses penuntutan tidak dapat dilaksanakan. Yang dalam hal ini menyebabkan proses penyidikan tidak dapat selesai selama 120 hari. Jadi dengan demikian jangka waktu penyidikan di Kejaksaan Flores Timur belum sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Adminsitasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Dalam

kasus yang masuk pada tahap penyidikan di tahun 2019 ini maka jaksa penuntut umum Tidak melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dikarenakan bukti yang diperoleh belum lengkap dan prioritas kasus yang perlu didahulukan. Jadi dengan demikian terkait dengan pelimpahan berkas perkara ini belum sesuai dengan ketentuan yang ada di karenakan belum dalam dapat diserahkannya berkas perkara sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

3.1.2 Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam kasus yang masuk tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Flores Timur dari kedua kasus yang ada semuanya pelaporan yang diterima atau pengaduan dari KBRF (Koalisi Bersatu Rakyat Flores Timur) dan telah dilaksanakan melakukan penyelidikan yang diperlukan membuat berita acara penyidikan, namun untuk kasus korupsi penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan berita acara yang diserahkan ke penyidik belum lengkap karena barang bukti yang terkumpul belum lengkap. Jadi dengan demikian hal ini sudah sesuai dengan norma yang ada yaitu Pasal 2 ayat 2.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam dua kasus di tahun 2019 yang masuk kedalam tahap penyelidikan jika dilihat dari data di atas dimana pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut umum kejaksaan Flores Timur. Pelaksanaan ini didasarkan karena dalam hal ini jaksa penuntut umum yang terdiri dari tim penyelidikan berjumlah 7 orang dan juga dalam pelaksanaannya dibuat surat perintah penyelidikan. Jadi dengan demikian hal ini telah sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Berdasarkan data yang diperoleh yang ada maka terkait kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Puskesmas Kalike, Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores

Timur hasilnya masih proses penyelidikan untuk mencari bukti terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, selain itu keempat kasus yang lain Berjalan di tahun 2020, menunggu perhitungan dari inspektorat. Jadi dengan demikian belum berjalan sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terkait dengan lima kasus yang masuk ke tahap penyelidikan dikejaksaan flores timur semuanya bahan keterangan, data, bukti terhadap tindak pidana korupsi penggunaan dana alokasi khusus belum dapat terpenuhi hal ini disebabkan karena beberapa kendala yaitu belum dilakukannya perhitungan kerugian selain itu juga di dalam proses penyelidikan kasus ini secara garis besar kejaksaan mengalami kendala yang dihadapi Jaksa penyidik dalam menangani perkara ini yaitu sebagai berikut Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada, keadaan geografis Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari 3 pulau, orang-orang yang dipanggil sudah tidak berada ditempat atau sudah lansia dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian terkait norma yang diatur di atas maka pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, di dalam kasus yang masuk pada tahap penyidikan tahun 2019 yaitu dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Kelautan Menengah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur TA.2014 dalam praktiknya kasus tersebut bersumber dari sumber penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang oleh pimpinan diputuskan untuk di tingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi dengan demikian terkait dengan sumber penyidikan telah sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terkait dengan tim penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Flores

Timur, dilaksanakan oleh 2 orang anggota yang terdiri dari 1 orang anggota koordinator dan 6 orang anggota. Jadi dengan demikian belum sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam kasus ini jaksa penuntut umum Telah menerima laporan, dan tidak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sudah melakukan pemeriksaan dan penyitaan, surat karena, hal ini disebabkan adanya kendala prioritas penyelesaian kasus yang ada di Kejaksaan Flores Timur maka untuk pelaksanaan penindakan ini belum dapat dilaksanakan oleh kejaksaan negeri Flores Timur. Dengan demikian sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terkait dengan kasus yang telah dilakukan upaya mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkannya, dalam kasus yang dalam tahap penyidikan ini namun dalam pelaksanaannya bukti yang diperoleh belum cukup maka masih dilanjutkan dalam tahap penyidikan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yaitu kelengkapan berkas dan prioritas penyelesaian kasus yang harus diselesaikan. Dikarenakan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi akan mengurus anggaran kejaksaan sendiri karena sarana dan prasarana yang tidak memadai dan berbagai permasalahan lain yang menyebabkan proses penuntutan tidak dapat dilaksanakan. Yang dalam hal ini menyebabkan proses penyidikan tidak dapat selesai selama 120 hari. Jadi dengan demikian belum sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam kasus yang masuk pada tahap penyidikan di tahun 2019 ini maka jaksa penuntut umum Tidak melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dikarenakan bukti yang diperoleh belum lengkap dan prioritas kasus yang perlu didahulukan. Jadi dengan demikian terkait dengan pelimpahan berkas perkara ini

belum sesuai dengan ketentuan yang ada di karenakan belum dalam dapat diserahkannya berkas perkara sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dari tiga kasus yang masuk ke tahap penuntutan di Kejaksaan Flores Timur maka dapat diketahui apabila sumber penuntutan yang berasal dari hasil penyidikan dari kejaksaan yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Rutin (Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa) di SMP Negeri 1 Adonara Timur tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016) an. Terdakwa SUBRAJA ALANG, S.Md., sementara itu yang berasal Polri yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Larantuka TA.2016 dan TA.2017 An. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Larantuka TA. 2016 An. PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Jadi dengan demikian terkait sumber penuntutan sudah sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Dari ketiga kasus yang masuk ke tahap penuntutan di tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan norma Pasal 38 yang ada. Dengan demikian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Dalam praktik yang ada mengenai pengembalian berkas perkara hasil penyidikan disertai petunjuk maka dari ketiga kasus yang di sampaikan di atas sudah melalui berbagai pengembalian berkas disertai petunjuk dan adanya koordinasi yang baik antara penyidik Polri dan penyidik kejaksaan. Jadi dengan demikian udah sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, tim penuntutan dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Flores Timur dilaksanakan oleh 7 orang Jaksa dimana seorang jaksa penuntut umum selaku koordinator yang merangkap sebagai anggota dan 6 orang jaksa penuntut umum. Jadi dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Terkait dengan jangka waktu penuntutan ini dalam ketiga kasus tersebut rata-rata dapat diselesaikan selama 150 hari sejak perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Namun dalam waktu 150 hari jaksa akan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih dikarenakan dalam proses penuntutan ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi yang berada di Kupang, yang pada dasarnya letaknya berbeda jauh dengan Kejaksaan Flores Timur. Hal ini lah yang menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu. Karena jumlah SDM yang ada untuk khusus menangani tindak pidana korupsi di Kejaksaan Flores Timur hanya berjumlah dua orang, jadi untuk menyelesaikan suatu perkara Kejaksaan Flores Timur akan memprioritaskan tindak pidana korupsi yang sudah masuk ke tahap penyidikan. Jadi dengan demikian telah sesuai dengan norma yang ada.

3.2 Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur

Tujuan dilakukannya tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi dapat ditemukan di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diatur di dalam beberapa ketentuan pasal yaitu salah satunya di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan yaitu:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

Lebih lanjut di dalam Pasal 26 mengatur mengenai:

“ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Dari data sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian akan untuk diukur mengenai efektivitas hukum, dalam melakukan pembahasan ini penulis menggunakan Teori dari Soerjono Soekanto, yaitu (Soekanto, 2008):

Berdasarkan pasal 3 tempat kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi ini disebutkan yaitu sebagai berikut:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibukota Kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.”

Pasal 3 ini lah bila dicermati menyimpan permasalahan karena di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 ini sendiri dijelaskan apabila pembentukan pengadilan tindak pidana Korupsi yang dibentuk di setiap ibu kota Kabupaten/kota dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, dengan demikian untuk pertama kali berdasarkan undang-undang Nomor 46 tahun 2009 pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan di setiap ibukota Provinsi. Dan setelah dua tahun berjalan di Nusa tenggara timur pada tahun 2011 dibentuk pengadilan negeri di Kupang namun hal ini menimbulkan masalah baru karena untuk melaksanakan penanganan tindak pidana korupsi di Kota Kupang diperlukan biaya yang besar. Lebih lanjut di dalam peraturan peralihan dalam undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 35 tidak diatur secara jelas kapan batas waktu setiap kota atau kabupaten melaksanakan pengadilan tindak pidana korupsi.

Kondisi ini menyebabkan perunan efektifitas dari penegakan hukum tindak pidana korupsi sendiri oleh kejaksaan dikarenakan biaya operasional sebagaimana yang telah diuraikan di dalam beberapa kasus yang disampaikan diatas sangat tinggi, bahkan beberapa kasus antara kerugaian Negara dan biaya operasional penanganan kasus lebih tinggi biaya penanganan kasus korupsi. Seperti table sebagaimana yang diuraikan di atas apabila di dalam menyelesaikan satu kasus

dibutuhkan 12 kali perjalanan dinas dan membawa minimal 2 orang sampai lebih. Jadi faktor hukum belum sesuai dengan norma yang ada.

Proses penegakan hukum bertujuan untuk melakukan peningkatan terhadap kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Upaya ini dilaksanakan dengan cara menertibkan fungsi, wewenang dan tugas lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan jatah ruang lingkupnya dan juga berdasarkan terhadap sistem kerjasama yang mendukung dan solid terhadap tujuan yang ingin dicapai, sejauh ini telah memperlihatkan jika upaya untuk berjuang oleh pihak masyarakat yang mendapatkan kerugian yang dilaksanakan melewati peradilan pidana tidak bias berjalan dengan baik dan efektif karena hasil yang dicapai kurang cukup menggembleng (Absori, 2005). Penegakan hukum selalu ditekankan kepada sisi ketertiban, sisi ketertiban tersebut memungkinkan karena penyebabnya oleh hukum yang disamakan dengan penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum formal. Pandangan ini sangat salah dikarenakan hukum mesti ditinjau di dalam satu sistem yang menyebabkan hubungan tertentu berbagai unsur yang ada di sistem hukum (Absori, Dimiyati, dan Wardiono, 2008).

Faktor penegak hukum yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas pelaksanaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur belum memadai karena secara kuantitas jumlah tersebut belum mencukupi dengan banyaknya kasus yang ada di Flores timur baik itu perkara umum ataupun perkara khusus contohnya korupsi. Jadi melihat keterbatasan tersebut apabila SDM tidak memadai jaksa di Kejaksaan flores timur dapat menangani berkas apapun, dengan syarat nama jaksa tersebut terdapat di P-16 (Surat perintah penunjukan jaksa) dari kajari di perkara tersebut. Selain itu juga dari kemampuan anggota kejaksaan itu sendiri masih banyak honorir yang ada di kejaksaan negeri Flores Timur, dengan demikian. Jadi faktor penegak hukum belum sesuai dengan norma yang ada.

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor-faktor yang mendukung adanya proses penegakan hukum terkhusus dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Flores Timur. Terkait dengan faktor sarana atau fasilitas ini di Kabupaten Flores timur mengalami kendala sebagaimana pada dua faktor sebelumnya yaitu hukum dan penegak hukum dalam hal ini masih mempengaruhi proses penegakan hukum

karena untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi di dalam setiap proses harus melewati perbedaan pulau. Dengan demikian untuk itu diperlukan sarana yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut, seperti contohnya transportasi dinas agar tidak memakan anggaran yang terlalu banyak. Karena untuk selaki perjalanan untuk satu orang biayanya Rp. 150.000 per orang sekali perjalanan untuk naik kapal, dan apabila naik pesawat biayanya Rp.650.000. jadi biaya operasional yang dibutuhkan sangat besar, bahkan antara kerugian Negara dengan biaya operasional penyelesaian kasus memungkinkan lebih besar. Jadi faktor sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum belum sesuai dengan norma yang ada.

Masyarakat sangat mendukung adanya pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat sangat kritis dan selalu membantu kejaksaan di dalam menangani perkara korupsi, bahkan kebanyakan kasus korupsi di Flores Timur berkat adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini digerakan oleh KBRF (Koalisi Bersatu Rakyat Flores Timur),. Bantuan ini sangat membantu kejaksaan Flores Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Flores Timur, karena dengan peran masyarakat yang aktif dalam melakukan pelaporan ketika terjadi tindak pidana korupsi akan mempermudah kejaksaan dalam melakukan proses hukum. Jadi faktor masyarakat sudah sesuai dengan norma yang ada.

Faktor kebudayaan yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi di Flores Timur yaitu erat kaitannya dengan factor masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Masyarakat di flores timur sangat aktif di dalam keikutsertaan di dalam mengawal suatu adanya tindak pidana di Flores Timur jadi dengan demikian hal ini menimbulkan kebiasaan yang sering timbul di dalam masyarakat, yaitu masyarakat menyampaikan aspirasi mereka ini melalui Demo terhadap pelaku yang biasanya adalah pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat melakukan demo di depan kantor penegak hukum, penggerak masa demo ini yaitu KBRF (Koalisi Bersatu Rakyat Flores Timur), dimana masyarakat akan ikut melakukan demo apabila mengalami kerugian terhadap dampak korupsi tersebut. Jadi Faktor kebudayaan sudah sesuai dengan norma yang ada

3.3 Konsep Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Flores

Timur

Gagasan atau konsep penanganan tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Flores Timur untuk kedepannya yaitu sebagai berikut: Menurut Sartjipto Rahardjo, penggunaan hukum untuk dijadikan instrument adalah perkembangan mutakhir di dalam sejarah hukum. Untuk dapat sampai ditingkat perkembangan tersebut diperlukan persyaratan tertentu (Absori dan Syiblunnur, 2017). Indonesia merupakan Negara kepulauan, jika setiap penyelesaian tindak pidana korupsi dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi maka untuk kabupaten-kabupaten terpencil dan luar pulau sangat kesulitan di dalam menangani tindak pidana korupsi. Dengan demikian perlu pengaturan yang tegas terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi kendala yang berkaitan waktu, jarak dan biaya dalam penanganannya.

Diperlukan Peningkatan jumlah jika penanganan tindak pidana korupsi masih dilaksanakan di Ibu Kota provinsi atau dengan segera membangun mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi di masing-masing kabupaten atau kota, agar setiap penyelesaian tindak pidana korupsi tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga citra dari penegak hukum dapat diperbaiki dengan baik. Dengan demikian jumlah sumber daya manusia yang ada sudah sangat mencukupi untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang baik di dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu untuk mengembalikan penegakan dan citra lembaga peradilan perlu melakukan perenungan yang lebih dalam memaknai kehidupan sosial dalam negara hukum (Absori, 2005).

Hart percaya apabila manusia terbatas niat baik untuk orang lain meskipun secara moralitas manusia secara khusus memiliki tanggungjawab dan malu atas tindakan terburuk yang tidak bisa dihindari, yang dalam hal ini membuktikan keniscayaan tuhan sebagai sumber pertanggunggaan yang diberikan. Dari uraian Hart tersebut berkorelasi jika keikutsertaan dari pihak lain sangat lah penting (Absori, Dimiyati, dan Wardiono, 2017). Sebagaimana di uraikan di atas jumlah pelaporan tergolong masih rendah dengan demikian diperlukan justice collaborator agar mengungkap kasus-kasus yang lain yang memiliki hubungan dengan perbuatan si pelaku. Keberadaan justice collaborator ini sangat penting karena untuk enumbuhkan partisipasi publik di dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu

itu, dengan imbalan yaitu mengurangi pemberian hukuman dari seorang palku yang memberikan kerjasama secara substansial di dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana korupsi yang diterapkan. Menurut Hans Kelsen, hukum digambarkan sebagai domain steril (bebas nilai) terpisah dari etis dan moral, disadari atau tidak ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku (*pattern of behavior*) di dalam masyarakat (Absori dan Achmadi, 2017).

Dengan demikian pemanfaatan justice collaborator ini akan secara langsung memberikan dampak yang sangat besar terhadap jumlah tindak pidana korupsi yang dapat diungkapkan dan meningkatkan efektifitas penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, penganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur di Tahun 2018 tahap penyelidikan dan penyidikan belum sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak ada kasus yang masuk ke tahap penuntutan, di tahun 2019 Tahap penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sementara itu tahap peneunutan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. *Kedua*, Terkait efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur bahwa pelaksanaan penaganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur didukung oleh faktor masyarakat dan kebudayaan, namun tidak didukung dengan faktor hukum dan penegak hukum dan sarana dan fasilitas pendukung. *Ketiga*, Konsep Pengananan tindak pidana Korupsi di Kejaksaan negeri Flores Timur dilaksanakn dengan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan negeri di masing-masing Kabupaten/kota hal ini penting untuk menimalisirkan waktu, jumlah penegak hukum dan juga biaya yang perlu dikeluarkan agar penaganan tindak pidana kroupsi berjalan secara efektif. Selanjutnya dengan meningkatkan SDM yaitu dengan meningkatkan jumlah atau meningkatkan skill yang dimiliki oleh penegak hukum, yang ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mekanisme whistle blower dan juga justice collaborator.

4.2 Rekomendasi

Dalam tesis ini penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut *Pertama*, Untuk lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT, Inspektorat Kabupaten atau Akuntan Publik harus pro aktif dalam melakukan perhitungan keuangan Negara yang rumit karena kejaksan negeri tidak memiliki keahlian teknis dalam perhitungan kerugian keuangan Negara. *Kedua*, untuk pembentuk undang-undang dan pemerintah agar membentuk suatu ketentuan agar pelaksanaan pengedilan tindak pidana sesegara mungkin dilaksanakan di setiap kabupaten atau kota. *Ketiga*, untuk masyarakat Flores Timur agar mempertahankan keaktifan dalam membantu aparat penegak hukum terutama kejaksan negeri Flores Timur dalam melaksanakan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan melaporkan setiap adanya kejangalan mengenai adanya tindak pidana korupsi.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Bapak Dr. Natangsa Surbakti S.H..Hum dan Dr. Kelik Wardiono., S.H..Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori dan Achmadi, 2017, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Nonsistematik Charles Sampord)*, Prosiding Konferensi Nasional ke 6, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA).
- Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.8, No.2 September 2005.
- Absori, 2005, *Pengekan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam era perdagangan bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan kelik wardiono, 2008, *Model Penyelesaian sengketa lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 2, juni 2008.
- Absori dan Muahammd Syiblunnur, 2017, *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupayen Kotawaringin Timur*, Surakarta: Megsiter Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, 2017, *Morality and law: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm*, Jurnal Dinamika Hukum Vo.17. No.1, Januari 2017.
- Aziz, Teuku Abdul, (2005), *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adnaeur Foundation.
- Faisal, Sanapiaah, 2007, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Malta dkk, (2018), *Keberdayaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan.*, Jurnal Penyuluhan, September 2018 Vol, 14 No.2.
- Meier, Gerald M. dan James E. Ruch, (2005), *Leading Issues in Economic Development*, Oxford: Oxford University Press.
- Setiadi, Wicipto, (2018), *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo,(2010), *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcodes/?view=download&id=4ffdbef1cdd3a99c7eb64af1885c8c, di akses pada hari Kamis 12 Desember 2019, Pukul 06:00 WIB.